

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2011 *Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. PT.Yasrif Watampone. Jakarta.
- Antonio Argandona, 2005, *Working Paper*. IESE Busniss School. Barcelona.
- Arief Wahyudi dan Arief Nurul. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*. Sinar Grafika. Bandung.
- Artidjo Alkostar. 2008. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 275. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta.
- Chaeruddin. 2008. *Strategi Pencegahan Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.
- Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. CV.Diadit Media. Jakarta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi. Edisi Ringkas. Transparency Internasional Indonesia*. Jakarta.
- Juni Sjafrien jahja. 2012. *Say No to Korupsi*. Visimedia. Jakarta.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nigel Walker. 1971. *Sentencing in a Rational Society*. Basic Books. Inc Publishers. New York.
- P.A.F. Lamintang. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P.J Bouman. 1976, *Sosiologi : Pengertian dan Masalah*. Kanisius. Jakarta.
- Ridwan Zachrie dan Wijayanto. 2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Robert Klitgaard. 2008. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Mukti Media. Depok.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum (Perkembangan. Metode dan Pilihan Masalahnya)*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- , 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soeprapto. 2012. *Sosiologi Hukum : Pengertian Dasar Sosiologi Hukum. Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Hukum*. UT. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Nusa media. Bandung.

- Theodorus M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyo Pramono. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.

## **JURNAL**

- Elizabeth Ghozali, *Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti*, Jurnal Hukum Justice, 2025.
- Hadi Purwadi. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana, Hukum UNS Vol. 2 Nomor 1 Juli-Desember 2016.
- Julista Mustamu. *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah*. Jurnal Sasi. Vol. 17. Nomor 2 April-Juni 2021.
- Lisa Dwi Fitriyanti & Agus Suwandono, *Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2023.
- Lutfi Ansori. *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Vol. 2. Nomor 1 Juni 2015.
- Lutfiatul Hasanah, *Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Nasrah Hasmiati Attas dan lain-lain, *Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11 No. 2, 2023.

Pradani Tyas Septiana & Wiwik Afifah, *Civil Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2025.

Rosiyanti, *Pengembalian Kerugian Negara sebagai Aplikasi Keadilan Restoratif*, Jurnal Fatwa Hukum, 2018.

#### **ARTIKEL**

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/13152/7>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_dugaan\\_korupsi\\_Soeharto](http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto)

[http://ICW: Penanganan Korupsi di Indonesia Tak Membuat Koruptor Jera](http://ICW:PenangananKorupsi%20di%20Indonesia%20Tak%20Membuat%20Koruptor%20Jera)

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejaung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-koruptor>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.